

ANALISIS DEMOGRAFI KOTA BANDUNG : TANTANGAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR SOSIAL

Fatira Isma ¹⁾, Liling Imbarnia ¹⁾

1) Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Surabaya

**Corresponding author:*

E-mail: 24051874001@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika demografi Kota Bandung serta implikasinya terhadap ketersediaan infrastruktur sosial di tengah laju urbanisasi yang pesat. Sebagai salah satu kota metropolitan utama di Indonesia, Bandung mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata 0,4-0,6% per tahun yang menimbulkan tekanan besar terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik pertumbuhan penduduk, mengidentifikasi ketimpangan spasial dalam penyediaan infrastruktur sosial, serta merumuskan strategi pembangunan kota yang seimbang dan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi BPS Kota Bandung, dokumen perencanaan daerah, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas sosial masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota seperti Coblong, Cicendo, dan Sukajadi, sementara wilayah pinggiran seperti Gedebage, Rancasari, dan Ujungberung masih kekurangan layanan dasar. Kepadatan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan menyebabkan munculnya permukiman padat, kemacetan, serta penurunan kualitas lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas infrastruktur sosial menuntut perencanaan terpadu berbasis data spasial dan penerapan konsep *urban compactness*. Penguatan transportasi publik, pembangunan hunian vertikal, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan menjadi langkah strategis menuju pembangunan kota Bandung yang inklusif dan berkelanjutan

Kata Kunci: Demografi, Infrastruktur Sosial, Pertumbuhan Penduduk, Urbanisasi, Kota Bandung

Abstract

This study examines the demographic dynamics of Bandung City and their implications for the availability of social infrastructure in an era of rapid urbanization. As one of Indonesia's major metropolitan areas, Bandung has experienced a steady population growth of around 0.4–0.6% per year, which has created significant pressure on education, health, housing, and transportation facilities. The research aims to describe the characteristics of population growth, identify the spatial disparities in social infrastructure provision, and formulate strategies for balanced and sustainable urban development. The study employs a qualitative descriptive approach using the Miles and Huberman interactive model, consisting of data reduction, presentation, and conclusion drawing. Secondary data were obtained from official reports of BPS Bandung, local government planning documents, and relevant academic literature. The findings reveal that infrastructure facilities are concentrated in the city center (Coblong, Cicendo, and Sukajadi), whereas suburban areas (Gedebage, Rancasari, and Ujungberung) experience limited access to basic services. High population density and limited land availability have led to informal settlements, traffic congestion, and environmental degradation. The study concludes that the imbalance between population growth and social infrastructure capacity requires integrated planning based on spatial data and the concept of urban compactness. Strengthening the provision of public transport, vertical housing, and equitable access to education and healthcare is essential to achieve inclusive and sustainable urban growth in Bandung City.

Keywords: Demography, Social Infrastructure, Urbanization, Population Growth, Bandung City

This is an open access article under the CC-BY-SA

license



PENDAHULUAN

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan utama di Indonesia yang memiliki daya tarik tinggi sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Keunggulan tersebut telah mendorong arus urbanisasi yang pesat dari wilayah sekitar maupun luar daerah, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan perubahan struktur ruang kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), jumlah penduduk Kota Bandung mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa dengan tingkat kepadatan sekitar 15.000 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu kota terpadat di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang relatif kecil secara persentase yakni sekitar 0,4 hingga 0,6 persen per tahun tetap memiliki dampak besar terhadap kebutuhan ruang, pelayanan publik, serta penyediaan infrastruktur sosial.

Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat membawa konsekuensi terhadap peningkatan permintaan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia menimbulkan berbagai persoalan perkotaan, seperti kemacetan, keterbatasan hunian layak, munculnya kawasan kumuh, serta ketimpangan akses layanan publik antara wilayah pusat dan pinggiran kota. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius bagi Kota Bandung untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Penelitian ini berfokus pada analisis keterkaitan antara dinamika demografi dan ketersediaan infrastruktur sosial di Kota Bandung. Tujuan utama penelitian adalah untuk mendeskripsikan karakteristik pertumbuhan penduduk dan sebaran spasialnya, menganalisis tantangan yang muncul akibat ketimpangan infrastruktur sosial, serta mengidentifikasi strategi pembangunan kota yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pelayanan publik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu geografi pembangunan wilayah dan manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam perencanaan infrastruktur yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Secara struktural, artikel ini disusun menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama memaparkan tinjauan pustaka dan kerangka teoretis mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk dan infrastruktur sosial. Bagian kedua menjelaskan metode penelitian dan hasil analisis mengenai kondisi demografi serta ketersediaan fasilitas sosial di Kota Bandung. Bagian ketiga menyajikan kesimpulan dan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan bagi kebijakan pembangunan perkotaan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Miles & Huberman, 2018) untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan infrastruktur sosial di Kota Bandung. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS, RPJMD, RTRW, serta laporan dinas terkait. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan:

1. Reduksi data untuk memilih informasi yang relevan
2. Penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian
3. Penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan tematik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki posisi strategis di wilayah barat Pulau Jawa. Secara geografis, kota ini terletak di tengah Cekungan Bandung dengan ketinggian sekitar 768 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kota Bandung umumnya berupa dataran bergelombang dengan daerah tinggi di bagian utara dan lebih landai di bagian

selatan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 16.729,65 hektar atau 167,3 km². Letak geografis serta kondisi topografinya menjadikan Kota Bandung beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 19°C–28°C.

Secara geografis, batas-batas wilayah Kota Bandung terdiri dari:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Cimahi,
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung

Secara administratif, Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Beberapa kecamatan dengan wilayah padat penduduk berada di pusat kota seperti Kecamatan Coblong, Cicendo, dan Bandung Wetan, sedangkan kecamatan di wilayah timur dan selatan seperti Gedebage dan Rancasari memiliki kepadatan yang lebih rendah. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2024 mencapai sekitar 2.591.763 jiwa dengan laju pertumbuhan sekitar 0,48 persen per tahun.

Pertumbuhan Penduduk dan Dinamika Demografi

Pertumbuhan penduduk di Kota Bandung selama 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang konsisten meskipun tidak terlalu tajam. Pada tahun 2011 jumlah penduduk tercatat sekitar 2,28 juta jiwa dan meningkat menjadi 2,58 juta jiwa pada tahun 2024. Secara rata-rata, pertumbuhan tahunan berada pada kisaran 0,4-0,6 persen. Kepadatan penduduk Kota Bandung tercatat mencapai lebih dari 14.000 jiwa per km². Faktor utama peningkatan populasi adalah urbanisasi dari daerah sekitar seperti Kabupaten Bandung dan Cimahi, migrasi mahasiswa dan pekerja sektor jasa, serta pertumbuhan alami. Struktur demografi Kota Bandung didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai sekitar 70 persen dari total populasi. Kondisi ini dapat menjadi potensi ekonomi apabila diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja dan fasilitas sosial yang memadai. Namun, tanpa dukungan infrastruktur yang cukup, dominasi usia produktif justru dapat menimbulkan tekanan terhadap layanan publik dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Kondisi dan Ketersediaan Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial di Kota Bandung meliputi berbagai fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi publik.

a. Infrastruktur Pendidikan

Kota Bandung memiliki banyak lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Namun, persebarannya belum merata. Fasilitas pendidikan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pusat kota dibandingkan daerah pinggiran. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam akses pendidikan antarwilayah. Pemerintah Kota Bandung telah berupaya melakukan pemerataan melalui program pembangunan sekolah baru serta peningkatan kualitas pendidikan.

b. Infrastruktur Kesehatan

Fasilitas kesehatan di Kota Bandung terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dan posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan. Berdasarkan data yang tercantum dalam proposal, terdapat sekitar 80 puskesmas dan 40 rumah sakit yang beroperasi di kota ini. Namun, sebagian besar fasilitas kesehatan masih terkonsentrasi di pusat kota. Rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk belum seimbang, dengan satu puskesmas melayani sekitar 30.000-32.000 jiwa. Keterbatasan lahan dan sumber daya menjadi kendala utama dalam memperluas fasilitas

kesehatan di wilayah padat penduduk. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan program “Puskesmas Modern dan Terintegrasi” sebagai upaya pemerataan layanan kesehatan.

c. Perumahan dan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang tinggi meningkatkan kebutuhan terhadap hunian. Permintaan perumahan di Kota Bandung meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, namun ketersediaan lahan yang terbatas menyebabkan harga tanah dan rumah semakin mahal. Akibatnya, muncul permukiman padat dan informal di beberapa wilayah seperti Antapani dan Kiaracondong. Program pemerintah seperti Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) dan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dilaksanakan untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Infrastruktur Transportasi

Sistem transportasi di Kota Bandung menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas akibat pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi. Sekitar 70 persen mobilitas penduduk masih mengandalkan kendaraan pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengembangkan proyek *Bus Rapid Transit* (BRT) Koridor Timur-Barat dan memperluas sistem angkutan kota terintegrasi. Program Bandung Smart Mobility menjadi bagian dari inisiatif Smart City yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan konektivitas transportasi publik.

Ketimpangan Spasial dan Dampak Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kota Bandung menciptakan ketimpangan spasial antara wilayah pusat dan pinggiran. Wilayah pusat kota memiliki fasilitas publik yang berlimpah, sedangkan daerah pinggiran masih tertinggal. Ketimpangan ini menimbulkan beban mobilitas yang tinggi, di mana masyarakat dari wilayah pinggiran harus melakukan perjalanan ke pusat kota untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dari perspektif perencanaan wilayah, kondisi ini menggambarkan ketidakseimbangan antara pusat (*core*) dan pinggiran (*periphery*) sebagaimana dijelaskan dalam teori *core-periphery*. Pusat kota tumbuh lebih cepat dengan fasilitas lengkap, sedangkan wilayah pinggiran mengalami perkembangan yang lebih lambat. Akibatnya, muncul arus migrasi harian dan peningkatan kepadatan di wilayah inti kota. Ketimpangan tersebut juga berdampak pada aspek sosial dan lingkungan. Permukiman di pusat kota semakin padat, ruang terbuka hijau berkurang, dan kualitas udara menurun. Di sisi lain, wilayah pinggiran menghadapi masalah urban sprawl yang menyebabkan konversi lahan pertanian. Kondisi ini menuntut kebijakan pembangunan yang menekankan pemerataan fasilitas publik serta penataan ruang yang berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak pertumbuhan penduduk terhadap infrastruktur sosial. Beberapa program unggulan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Sekolah Inklusif dan Merata, bertujuan meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah kota,
- b. Puskesmas Modern dan Terintegrasi, untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan,
- c. Program Rutilahu dan Kotaku, yang menitikberatkan pada perbaikan rumah warga berpenghasilan rendah,
- d. Pengembangan Sistem Transportasi Publik Terintegrasi melalui pembangunan BRT dan Bandung Smart Mobility,

- e. Program Bandung Smart City dengan penguatan sistem informasi perkotaan melalui Bandung Command Center.

Meskipun berbagai program tersebut telah menunjukkan kemajuan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta resistensi sosial di beberapa wilayah. Tantangan ke depan adalah bagaimana kebijakan pembangunan dapat diarahkan untuk memperkuat pemerataan fasilitas sosial sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan.

SIMPULAN (12 pt, bold)

Pertumbuhan penduduk di Kota Bandung memiliki pengaruh signifikan terhadap ketersediaan dan pemerataan infrastruktur sosial. Ketimpangan spasial antara pusat dan pinggiran kota menyebabkan tekanan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan, diperlukan kebijakan integratif yang memadukan data demografi, tata ruang, dan penyediaan infrastruktur sosial. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pemerataan investasi infrastruktur, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas publik. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan Kota Bandung yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan spasial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Zakiati & Wisnu Aribowo. (2022). Karakteristik Pergerakan Berdasarkan Kepadatan Penduduk untuk Tujuan Bekerja di Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2023). Statistik Kota Bandung 2023.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Deni Rizki Kurniawan. (2021). Penyediaan Perumahan dan Infrastruktur Dasar di Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Bandung. Universitas Pasundan.
- Lili Somantri. (2022). Pemetaan Mobilitas Penduduk di Kawasan Pinggiran Kota Bandung. *Jurnal Geografi dan Pembangunan Wilayah*, 11(1), 34–42.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Putra, S. H., & Darwin, I. S. (2024). Dampak Urbanisasi terhadap Perkembangan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Bandung Kulon.
- Vitriana, A. (2020). Tipologi Penyediaan Infrastruktur Perumahan di Kawasan Peri-urban Metropolitan Bandung Raya.